

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan Negara Republik Indonesia sangat pesat terutama dalam bidang perbankan, hal ini menunjukkan bahwa peranan perbankan membantu dalam menunjang perekonomian negara ini. Perbankan menjadi kebutuhan pemerintah maupun masyarakat, sehingga menjadi tolak ukur kemajuan perekonomian suatu negara. Menurut Kasmir (2006:2) perbankan diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana ke masyarakat dan memberikan jasa-jasa bank yang lainnya.

Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu bank yang melakukan usaha secara konvensional dengan mengandalkan suku bunga dan *fee based*, dan bank yang melakukan usaha secara syariah yang mengandalkan sistem bagi hasil atau *profit sharing* (Kasmir, 2006:23). Sejarah berdirinya perbankan dengan sistem bagi hasil, berdasarkan pada dua alasan utama yaitu pertama adanya pandangan bahwa bunga (*interest*) pada bank konvensional hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam agama, bukan saja pada agama Islam tetapi juga oleh agama samawi lainnya, kedua dari aspek ekonomi, penyerahan resiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan. Dalam jangka panjang sistem perbankan konvensional akan menyebabkan penumpukan

kekayaan pada segelintir orang yang memiliki kapital besar (Sjahdeini, 1999). Sedangkan menurut Muhammad (2005:110 - 111) faktor - faktor yang mempengaruhi mudharabah besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung. Faktor langsung yaitu *investment rate*, jumlah dana, nisbah bagi hasil, sedangkan faktor tidak langsung yaitu penentuan pendapatan atau biaya mudharabah dan aktivitas yang diterapkannya.

Salah satu alasan utama nasabah menginvestasikan modalnya pada perbankan syariah yaitu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip syariat Islam yaitu Al Qur'an dan Hadits. Dalam pelaksanaannya perbankan syariah mengharamkan adanya unsur bunga atau riba, akan tetapi memperbolehkan menggunakan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil merupakan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam transaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai - nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

Di samping itu alasan yang lain nasabah menginvestasikan modalnya di perbankan syariah diantaranya memiliki resiko rendah dengan tingkat *return* yang diharapkan juga rendah. Walaupun tingkat *return* yang diharapkan rendah, akan tetapi membuat nasabah merasa lebih aman dalam berinvestasi pada jangka waktu yang panjang. Konsep Islam yang diterapkan oleh perbankan syariah menjadikan keunggulan kompetitif dalam

mendapatkan kepercayaan dari nasabah untuk menginvestasikan dana kepada bank syariah. Hal ini terwujud dengan semakin berkembangnya persaingan perbankan syariah di Indonesia mulai dari lima tahun terakhir, sebagaimana data yang tercantum dibawah ini.

Tabel 1.1
Jaringan Kantor Perbankan Syariah
(Islamic Banking Network) Tahun 2007 - 2012

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bank umum syariah						
- Jumlah bank	3	5	6	11	11	11
- Jumlah kantor	401	581	1.215	1.215	1.401	1.745
Unit usaha syariah						
- Jumlah bank umum konvensional yang memiliki UUS	26	27	27	23	24	24
- Jumlah kantor	196	241	287	262	336	517
Bank pembiayaan Rakyat Syariah						
- Jumlah bank	114	131	138	150	155	158
- Jumlah kantor	185	202	225	286	364	401
Total Bank	782	1.024	1.223	1.763	2.101	2.663

Sumber Data: Statistik BI, 2011

Pada tabel 1.1 di atas menunjukkan dari periode tahun 2007 – 2012 perkembangan perbankan syariah semakin bertambah pesat, disebabkan masyarakat mulai mempercayakan berinvestasi pada bank syariah. Tahun 2007 jumlah total kantor perbankan syariah menunjukkan 782 kantor, pada tahun 2008 jumlah kantor meningkat sebesar 1.024 di kantor perbankan syariah, kemudian tahun 2009 total kantor perbankan syariah berjumlah 1.223, dan pada tahun 2010 dan 2011 juga menunjukkan pertambahan jumlah total kantor perbankan syariah dari 1.763 menjadi 2.101 sedangkan tahun 2012 menunjukkan 2.663 total kantor perbankan syariah. Perkembangan ini, dipengaruhi oleh aktivitas – aktivitas yang ada pada perbankan syariah.

Aktivitas dalam perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh dana pihak ketiga. Disamping itu, ada juga dana dari dana pertama (modal sendiri), dan dana kedua (pinjaman). Produk dana pihak ketiga perbankan syariah yang ditawarkan adalah giro, tabungan dan deposito mudharabah. Sebagaimana data yang tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Komposisi DPK - Bank Umum Syariah
dan Unit Usaha Syariah tahun 2007 - 2012

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Giro iB akad wadiah	3.750	4.238	6.202	9.056	12.006	17.708
Tabungan iB	9.454	12.471	16.475	22.908	32.602	45.072
a. Akad wadiah	645	958	1.538	3.338	5.394	7.449
b. Akad mudharabah	8.809	11.513	14.937	19.570	27.208	37.623
Deposito iB Akad Mudharabah	14.807	20.143	29.595	44.072	70.806	84.732
a. 1 bulan	9.309	14.325	19.794	31.873	50.336	53.700
b. 3 bulan	1.406	1.919	4.544	6.165	10.629	17.653
c. 6 bulan	1.296	1.827	1.758	2.294	4.286	6.421
d. 12 bulan	2.787	2.066	3.497	3.738	5.609	6.953
e. > 12 bulan	9	6	3	3	45	5
Total	28.012	36.852	52.271	76.036	115.415	147.512

Sumber data: statistik BI 2013

Pada tabel 1.2 menunjukkan komposisi jumlah pada produk dana ketiga pada perbankan syariah yaitu giro, tabungan, dan deposito pada tahun 2007 – 2012. Produk dana pihak ketiga yang jumlah komposisi dari tahun ke tahun lebih tinggi terdapat pada deposito mudharabah. Pada Tahun 2010 menunjukkan bahwa deposito mudharabah jumlah Rp 44.072, sedangkan pada giro dan tabungan jumlah komposisinya berjumlah Rp 9.056 dan Rp

22.908. maka produk dana pihak ketiga yang menyumbang jumlah komposisi terbesar dalam aktivitas perbankan syariah yaitu pada deposito mudharabah. Sehingga, perbankan syariah lebih intens memperhatikan yang menjadi kendala pada deposito mudharabah di perbankan syariah itu sendiri.

Secara teori mudharabah adalah akad kerja sama atau usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shohibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (Antonio, 2001:95). Jenis simpanan mudharabah ada tiga bentuk yaitu giro, tabungan dan deposito mudharabah. Diantara tabungan dan deposito tidak ada perbedaannya, tetapi pada pelaksanaannya dibedakan antara tabungan dan deposito sesuai dengan jangka waktu pengambilan atau penarikannya di bank yang telah ditentukan. Deposito (*time deposit*) merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat – surat berharga (Kasmir, 2006:93). Sedangkan deposito syariah itu sendiri diperbolehkan dalam Islam yang sebagaimana dicantumkan dalam Undang – Undang No. 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Salah satu faktor alasan nasabah berinvestasi pada bank konvensional adalah mendapatkan bunga bank yang dapat dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari melakukan tabungan, sedangkan dalam bank syariah nasabah menginvestasikan modalnya untuk mendapatkan bagi hasil, dalam Al Qur'an juga dijelaskan bahwa kerjasama akan menciptakan kemakmuran dan

keadilan dalam bermuamalah. Pengertian bagi hasil menurut Antonio (2001:90) bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Tingkat bagi hasil ini yang mempengaruhi seorang melakukan deposito mudharabah yang mana dalam penelitian Anisah, Nur (2013) bahwa ada pengaruh positif dan signifikan variable bagi hasil terhadap deposito mudharabah. Sedangkan menurut Antonio (2001:60) dalam teorinya menyatakan bahwa bagi hasil adalah Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan masyarakat juga tergantung pada kebijakan moneter yang diterapkan pada suatu negara.

Pada saat terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, pada tahun 2007 maka timbul permasalahan yang cukup rumit yang telah membuat perekonomian Indonesia yang semula mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, sehingga menimbulkan terjadinya Inflasi, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Pertumbuhan Inflasi
Di Indonesia Periode Tahun 2000 – 2012

Tahun	Inflasi (%)	Tahun	Inflasi (%)
2000	9,35	2007	8,50
2001	12,55	2008	5,36
2002	5,10	2009	5,13
2003	6,40	2010	5,38
2004	17,10	2011	4,28
2005	6,60	2012	5,10
2006	6,50		

Sumber : Laporan Bank Indonesia (diolah kembali)

Pada tabel 1.3 terlihat bahwa perkembangan laju inflasi selama tahun 2000 - 2012 berfluktuatif. Diukur dengan kenaikan IHK laju inflasi dalam

tahun 2005 laju inflasi tersebut menurun dengan pesat sebesar 6,60%. Penurunan laju inflasi pada tahun 2006 berkaitan erat dengan lebih terkendalinya permintaan dalam negeri serta lebih stabilnya penawaran agregate. Pada tahun 2007 Indonesia mengalami krisis moneter, Rupiah terus melemah, harga-harga bahan pokok dan kebutuhan lainnya yang berbahan impor mengalami peningkatan secara terus menerus sehingga terjadi lonjakan inflasi yang begitu besar. Pada tahun 2008 menunjukkan kecenderungan yang menurun hal ini terutama disebabkan oleh menguatnya nilai tukar rupiah dan membaiknya inflasi.

Inflasi sendiri menyebabkan kecenderungan dari harga – harga untuk menaik secara terus menerus. Sehingga seorang nasabah masyarakat melakukan konsumsi daripada berinvestasi pada bank, hal ini disebabkan inflasi dengan tingkat suku bunga rendah. Dampak inflasi para penabung ini enggan untuk menabung inflasi terhadap deposito mudharabah pada Bank Syariah Mandiri yaitu -0.325 dengan nilai signifikansi 0.000 ($0.000 < 0.05$), Karena koefisien regresi bernilai negatif yaitu -0.325, hal ini disebabkan ketika terjadi inflasi mengalami kenaikan, maka para nasabah akan mencairkan dananya untuk mempertahankan tingkat konsumsinya.

Akan tetapi dalam kenyataannya inflasi di Indonesia yang dikutip pada berita media online bahwa “hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan resiko proyek – proyek investasi dan dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata – rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distorsi informasi tentang harga – harga

relatif. Tetapi kenyataannya keputusan Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga BI rate di level terendahnya 5,75 % dengan alasan laju inflasi di bulan september kemarin cukup rendah. Masih terkendalinya inflasi hingga bulan kemarin menjadi salah satu alasan BI tetap mempertahankan suku bunga patokan BI rate karena dianggap masih sesuai dengan kondisi perekonomian serta masih dalam koridor target inflasi sepanjang tahun ini sekitar 3,5% – 5,5 %” (www.tempo.com).

Kondisi kebijakan pemerintah ini telah menyebabkan lembaga perbankan akan terus menerus merugi dan modalnya semakin terkuras yang akhirnya berakibat pada likuidasi sejumlah bank. Disamping itu, kebijakan tersebut sangat mempengaruhi lembaga keuangan dalam menghadapi inflasi yang tinggi sehingga terjadi nilai uang beredar yang rendah, sehingga masyarakat menarik dananya daripada berinvestasi. Kebijakan pemerintah untuk terus menjaga kesinambungan fiskal serta komitmen pada Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai rupiah dan memperkuat sistem perbankan memberikan dampak positif ke arah perkembangan perekonomian.

Perkembangan perekonomian berarti kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Maka apabila masyarakat makmur perubahan dalam nilai pendapatan nasional pada suatu tingkat kegiatan investasi juga bertambah. Pertumbuhan pendapatan suatu negara dapat diketahui melalui produk domestik bruto. Produk domestik

bruto adalah mengukur tingkat kemakmuran yang terjadi di suatu negara dari segi struktur ekonomi maupun hubungan antara komponen-komponennya.

Menurut Rahardja dan Manurung (2008:16) produk domestik bruto adalah total output (produksi) yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Manfaat perhitungan PDB yaitu sebagai mengukur tingkat kemakmuran, tingkat kesejahteraan, memperoleh perbandingan produktivitas antarnegara, dan mencatat kegiatan – kegiatan ekonomi tak tercatat (*underground economy*). Pertumbuhan Produk domestik bruto Indonesia dapat dilihat sebagai berikut ini:

Tabel 1.4
Pertumbuhan PDB
Di Indonesia Periode Tahun 1997 – 2012

Tahun	PDB Dalam Miliar Rupiah
1997	433.246,00
1998	376.051,60
1999	376.902,50
2000	397.666,30
2001	411.691,00
2002	426.740,50
2003	441.790,00
2004	445.674,00
2005	468.512,92
2006	474.582,14
2007	489.545,75
2008	520.614,02
2009	544.712,60
2010	578.614,70
2011	616.169,13
2012	654.534,80

Sumber : Laporan Bank Indonesia (diolah kembali)

Pada tabel 1.4 menunjukkan bahwa dalam perkembangan produk domestik bruto di tahun 1997 Indonesia mengalami krisis nilai tukar, sehingga perekonomian di Indonesia mengalami penurunan. Proses

penyebaran krisis berkembang cepat mengingat keterbukaan Perekonomian Indonesia dan ketergantungan pada sektor luar negeri yang sangat besar menyebabkan krisis tersebut berkembang semakin parah. Karena terdapat berbagai kelemahan mendasar di bidang perekonomian nasional terutama di tingkat mikro. Dengan kondisi dalam dan luar negeri yang semakin kondusif di tahun 2000 proses stabilitas ekonomi Indonesia berjalan cukup mantap dan telah memberikan peluang bagi pemulihan kestabilan terhadap segala perbaikan aktifitas ekonomi Indonesia.

Sedangkan dalam teori produk domestik bruto terkait produk domestik bruto menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi tabungan masyarakat (Sukirno, 2005:379). Dalam teori keynes menyatakan bahwa tabungan sangat terkait dengan kepada pendapatan nasional (pendapatan seluruh penduduk dalam perekonomian). Dalam pertumbuhan ekonomi nasional secara makro cukup baik, tapi realitasnya tidak memberikan dampak positif dalam perbaikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, Indonesia mendapat pujian dari berbagai lembaga ekonomi internasional, dipersepsikan semakin aman bagi investasi asing, serta tergolong dalam negara tujuan investasi yang semakin disukai. tingginya PDB suatu negara tidak menjamin rakyatnya sejahtera secara ekonomi. Akan tetapi data pada BPS, bahwa penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan pada 2011 ada sekitar 12,36 persen atau sekitar 30 juta jiwa, sedangkan data Bank Dunia, penduduk miskin di Indonesia mencapai 100 juta jiwa (www.antaraneews.com).

Angka PDB adalah angka rata-rata yang tidak sesuai dengan kenyataan. di Indonesia jumlah konglomerat sangat sedikit dibandingkan dengan rakyat miskinnya. Banyaknya penduduk miskin hal ini juga akan mempengaruhi kesejahteraan hidupnya. Rakyat miskin hanya hanya dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dibandingkan investasi. Sehingga investasi yang diharapkan pada perbankan, tidak setinggi jumlah produk domestik bruto yang menunjukkan jumlah Rp 2.618,1 triliun pada tahun 2000 naik menjadi 6,23% pada tahun 2012.

Maka, hasil penelitian terdahulu menjadi acuan pedoman penelitian yang akan dilakukan diantaranya yaitu Wibowo (2003) menyatakan Pendapatan (GDP) menunjukkan pengaruh positif terhadap simpanan mudharabah dalam jangka panjang sedangkan bagi hasil pengaruh negatif terhadap simpanan mudharabah dalam jangka waktu pendek, Susanti (2011), Mu'tamaroh, Laeli (2009) dan Faizi (2009) menyatakan variabel bagi hasil signifikan positif pada simpanan mudharabah. Widiastama (2006) menyatakan bahwa total bagi hasil mudharabah berpengaruh signifikan positif terhadap total simpanan Mudharabah. Azmy (2008) dalam penelitiannya menunjukkan hasil statistik secara simultan menunjukkan signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah*. Gabungan variabel independen variabiliti tingkat bagi hasil bank umum Syariah sebesar 46%. Maula (2012) bahwa suku bunga, bagi hasil, inflasi, saham JII, dan JUB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah. Mubasyiroh (2008) menyatakan bahwa dalam penelitiannya pada tingkat

suku bunga dan inflasi menunjukkan pengaruh negatif pada total simpanan mudharabah. Sedangkan Pracoyo dan Widiastuti (2008) menyatakan dalam jurnalnya bahwa bagi hasil berpengaruh positif secara signifikan dengan *confidence interval* 95% terhadap pembiayaan bagi hasil. Anisah, Nur dkk (2013), menyatakan bahwa dalam jurnalnya bagi hasil berpengaruh pada deposito mudharabah.

Dari data di atas bahwa penelitian di atas menjadi acuan dan rujukan. Maka dapat menjadi landasan masalah bagi penulis dalam melakukan penelitian. Dengan adanya alasan di atas maka dapat diambil satu judul: **“Pengaruh Nisbah Bagi Hasil, Inflasi, dan Produk Domestik Bruto Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh secara parsial nisbah bagi hasil, inflasi, dan produk domestik bruto terhadap deposito mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia?
2. Apakah ada pengaruh secara simultan nisbah bagi hasil, inflasi, dan produk domestik bruto terhadap deposito mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia?
3. Variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap besarnya deposito mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ada pengaruh secara parsial nisbah bagi hasil, inflasi, dan produk domestik bruto terhadap deposito mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui ada pengaruh secara simultan nisbah bagi hasil, inflasi, dan produk domestik bruto terhadap deposito mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh terhadap deposito mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat bagi Penulis

Bagi Penyusun penelitian ini diharapkan disamping sebagai bentuk penerapan disiplin ilmu yang telah didapatkan selama mengikuti perkuliahan, juga untuk menambah serta mengembangkan wawasan dan pengetahuan tentang dunia perbankan.

2) Manfaat bagi Dunia Akademis

Bagi dunia Akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi intelektual kepada para peneliti ataupun pembaca, baik sebagai referensi maupun sebagai wawasan keilmuan yang dapat mendukung kegiatan akademis.

3) Manfaat bagi Perusahaan

Bagi Praktisi penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi berkaitan dengan kinerja Bank Syariah Indonesia dalam pengumpulan dana pihak ketiga yaitu pada deposito mudharabah.

1.4 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti akan memberi batasan masalah sehingga penelitian ini lebih fokus dan objektif sebagai berikut:

1. Pengambilan data pada Bank Umum Syariah yang berada di Bank Indonesia yaitu Bank Syariah Muamalat Indonesia, Bank Syariah mandiri, dan Bank Syariah Mega Indonesia.
2. Pengambilan data laporan keuangan yang ada pada situs resmi Bank Umum Syariah Indonesia.
3. Periode penelitian yaitu triwulanan dari triwulan I tahun 2008 – triwulan III tahun 2012.
4. Pengambilan data deposito mudharabah dan nisbah bagi hasil (mudharabah mutlaqah atau dana tidak terikat) pada laporan keuangan Bank Umum Syariah Indonesia.
5. Data variabel inflasi diperoleh pada situs resmi SEKI yaitu *www.bi.go.id*.
6. Data PDB diperoleh pada situs resmi BPS yaitu *www.bps.go.id*.